



LAPORAN EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN II

 DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

2025

• • • •

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

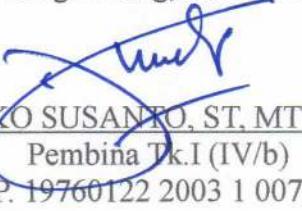
Laporan ini disusun sebagai sarana penyajian data dan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta pemantauan rencana aksi Dinas Perhubungan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam hal keselamatan transportasi, pelayanan angkutan umum, pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, serta penerangan jalan umum.

Penyusunan laporan ini dilakukan sebaik mungkin dengan harapan dapat menjadi acuan bagi pimpinan Dinas, jajaran internal, serta para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan rencana kerja triwulan berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan pelaksanaan kegiatan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif agar laporan evaluasi berikutnya dapat lebih baik dan lebih komprehensif.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan transportasi perkotaan yang lebih efektif dan berkualitas.

Singkawang, Juli 2025


EKO SUSANTO, ST, MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760122 2003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan	1
1. Maksud.....	1
2. Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Singkawang	2
BAB II EVALUASI	11
A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
B. Evaluasi atas Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	13
C. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi	19
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	23
A. PERMASALAHAN	23
B. REKOMENDASI.....	24
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan kinerja.

Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penyediaan sarana prasarana transportasi, serta pengelolaan penerangan jalan umum (PJU). Oleh karena itu, laporan evaluasi internal ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Dinas Perhubungan Kota Singkawang Triwulan II Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam bidang

penyelenggaraan transportasi darat, lalu lintas dan angkutan jalan, sarana prasarana transportasi, serta pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Singkawang.

2. Tujuan

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta realisasi program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan transportasi, keselamatan lalu lintas, dan pelayanan publik di bidang perhubungan.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan dalam perencanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan pada periode berikutnya.

D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga- lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas, yang terdiri dari:
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, yang terdiri dari:
1. Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
 2. Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran.
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Tugas Pokok:

Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Bidang:

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan aset;
- b. Penyelenggara kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c. Penyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang manajemen lalu lintas, serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang manajemen lalu lintas;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen lalu lintas;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen lalu lintas;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen lalu lintas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang manajemen lalu lintas yang diberikan oleh Kepala bidang.

2 Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang keselamatan lalu lintas;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang keselamatan lalu lintas;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan lalu lintas;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keselamatan lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang keselamatan lalu lintas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan meliputi manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran, serta mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1. Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan

Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen terminal dan angkutan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang manajemen terminal dan angkutan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen terminal dan angkutan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen terminal dan angkutan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen terminal dan angkutan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang manajemen terminal dan angkutan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran

Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran mempunya tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen perparkiran dan pelayaran. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen perparkiran dan pelayaran; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain bidang manajemen perparkiran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan transportasi meliputi pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem transportasi. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan sistem transportasi;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan sistem transportasi;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sistem transportasi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan sistem transportasi; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain bidang pengembangan sistem transportasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum yang diberikan oleh Kepala Bidang.

F. UPT

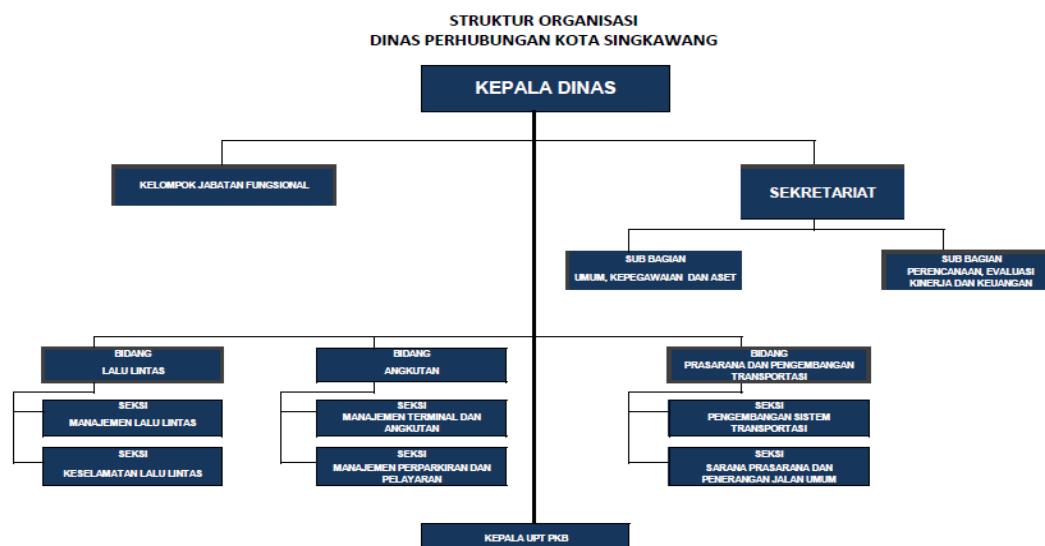
Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT PKB;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT PKB dengan unit kerja terkait;
- c. Menyelenggarakan uji syarat teknis, penetapan daya angkut laik dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor;
- d. Melayani informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- e. Melaksanakan kerja sama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. Melaksanakan administrasi UPT PKB;

- g. Melaksanakan publikasi dan pengaturan acara UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pengaji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Pengaji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terbagi dalam berbagai tingkatan, antara lain Pengaji Penyelia, Pengaji Mahir, Pengaji Terampil dan Pengaji Pemula.



BAB II

EVALUASI

A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi TW II	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	18,5	3,2	17,3%
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas	50	50	100%

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat persentase pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian IKU Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Target angka kecelakaan lalu lintas tahun 2025 ditetapkan sebesar 18,5. Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 3,2, sehingga capaian kinerja mencapai 17,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Singkawang jauh lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan gambaran peningkatan signifikan pada aspek keselamatan transportasi perkotaan.

Pencapaian ini juga mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan kecelakaan yang dilakukan melalui peningkatan infrastruktur lalu lintas, pemeliharaan PJU, serta kegiatan sosialisasi keselamatan jalan. Meskipun capaian ini sangat baik, Dinas Perhubungan tetap perlu menjaga konsistensi serta melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan kecelakaan agar tren positif ini dapat dipertahankan.

2. Capaian IKU Rasio Konektivitas

Target rasio konektivitas transportasi perkotaan tahun 2025 sebesar 50. Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 tercapai sebesar 50, atau 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam peningkatan konektivitas transportasi sudah sesuai dengan rencana. Capaian ini menandakan bahwa trayek angkutan umum dan jalur transportasi perkotaan di Kota Singkawang telah terlayani sesuai target, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat

terhadap layanan transportasi publik. Meski demikian, diperlukan langkah-langkah penguatan agar konektivitas tetap terjaga dan dapat ditingkatkan, terutama dalam menghadapi potensi pertumbuhan permintaan transportasi dan perluasan wilayah pelayanan di masa mendatang.

B. Evaluasi atas Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian kinerja dan realisasi anggaran program serta kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program serta Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan		Indikator		Realisasi Fisik		Sisa
			Tw.1	Tw.2	Target	Indikator	Tw.1	Tw.2	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.392.000	8.392.000	-	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.672.000	-	-	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	3.672.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.672.000	-	-	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	3.672.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.196.000	4.196.000	-	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.672.000	-	-	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	0	0	3.672.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.568.000	3.568.000	-	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.672.000	-	3.672.000	5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	0

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.532.359.601	1.028.396.663	1.872.113.484	840	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	189	3.631.849.454
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.280.000	43.095.000	42.345.000	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	90.840.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.294.000	6.294.000	-	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.568.000	3.568.000	-	1	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.140.000	-	4.140.000	2	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	0
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.696.000	3.696.000	-	2	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.500.000	-	-	2	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	8.500.000
15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.672.000	-	3.672.000	12	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	3	0
16	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.172.557	5.172.557	-	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.349.360	34.054.800	13.875.000	4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1	34.419.560
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.112.200	4.240.000	6.927.200	2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	14.945.000
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	390.000	585.000	12	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	2	3	1.725.000

20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000	9.657.100	79.606.934	150	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	68	130.735.966
21	Pengadaan Mebel	18.000.000	-	15.984.000	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	2.016.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.336.804	72.413.426	54.342.397	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	280.580.981
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	837.405.528	210.103.135	143.283.041	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Disediakan Kantor yang Disediakan	3	3	484.019.352
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.400.000	5.127.600	11.311.705	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	2.960.695
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.366.422	55.628.747	97.616.105	35	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	145.121.570
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.370.000	-	-	76	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	29.370.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.840.000	-	-	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipe lihara/Direhabilitasi	0	0	25.840.000
28	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10.584.000	-	-	1	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	10.584.000
29	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.370.507.155	777.983.677	797.524.745	125	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	4.794.998.733
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	569.754.970	205.128.262	190.155.770	30	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	30	174.470.938

31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	54.962.136	-	-	50	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0	54.962.136
32	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-	0	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0	0	0
33	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	8.000.000	-	7.992.000	1	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0	1	8.000
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	169.135.000	19.200.000	58.360.000	12	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	91.575.000
35	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	132.547.150	8.656.460	14.183.685	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4	2	109.707.005
36	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.680.000	-	8.142.900	7	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	1	8.537.100
37	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53.339.200	-	40.000.000	2.500	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	1,600	13.339.200
38	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000.000	-	-	10	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	3.000.000
39	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.055.520	-	22.764.000	33	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	0	11	67.291.520

40	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.500.000	-	-	50	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	7.500.000
41	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	214.125.800	53.340.000	39.140.000	12	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3	3	121.645.800
42	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.130.600	-	-	1	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	7.130.600
43	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20.764.000	-	4.200.000	4	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	2	16.564.000
44	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	199.808.004	-	2.400.000	2	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	0	0	197.408.004
45	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-	1	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	0	40.000.000
46	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	8.252.000	-	-	5	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	8.252.000
47	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32.000.000	-	25.181.000	1	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	1	6.819.000

48	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	70.888.000	9.868.000	14.162.000	12	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	3	46.858.000
49	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.683.000	-	-	12	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	2.683.000
50	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1.674.000	-	-	7	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	0	0	1.674.000
Jumlah		16.824.797.007	2.572.169.425	3.573.679.966	4070		241	1945	10.678.947.614
Percentase (%)		100%	15,29%	21,24%			5,92%	47,79%	63,47%

Dari Tabel 2.2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Realisasi Keuangan, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi keuangan Dinas Perhubungan telah mencapai Rp6.145.849.391 dari total pagu dana sebesar Rp16.824.797.007, atau setara dengan 36,53%. Capaian ini merupakan akumulasi dari Triwulan I dan II, dan meskipun menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi awal tahun, persentasenya masih berada pada kategori sedang. Hal ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran serta penyesuaian pada beberapa sub kegiatan yang tidak seluruhnya terealisasi sesuai rencana awal.
- Realisasi Fisik, capaian kinerja fisik program dan kegiatan Dinas Perhubungan hingga Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai 53,72%, dengan realisasi indikator sebesar 2.186 dari target 4.070. Angka ini menggambarkan progres yang cukup baik, mengingat pada Triwulan I baru tercapai sebesar 5,92%. Namun demikian, masih terdapat sub kegiatan yang dalam tahap proses pelaksanaan dan akan berlanjut pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana penyesuaian anggaran kas.

C. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Evaluasi Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA CAPIAAN KINERJA				REALISASI CAPIAAN KINERJA				ANGGARAN	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB
						TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Dacra Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Dacra	100 %										Rp 8.741.406.472		
		1. Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Penyelesaian	Persentase Pelaksanaan Perencanaan	100 %					73					Rp 30.844.000		
		1) Sub.Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Penangkal Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%					Rp 8.392.000	Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan penyusunan dokumen perangkat daerah	Sekretariat
		2) Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			0%	0%				Rp 3.672.000	Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja perangkat daerah	Sekretariat
		3) Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			0%	0%				Rp 3.672.000		Sekretariat
		4) Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen				100%					Rp 4.196.000		Sekretariat
		5) Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			0%	0%				Rp 3.672.000		Sekretariat
		6) Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen					100%				Rp 3.568.000		Sekretariat
		7) Sub.Keg Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			100%				Rp 3.672.000	Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sekretariat
		2 Keg. Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	2 Dokumen										Rp 6.718.501.601		
		1) Sub.Keg Penyediaan Caja dan Tunjangan ASN	Cakupan Gaji dan Tunjangan	100 %	25%	25%	25%	25%	16%	29%				Rp 6.532.359.601	Mengecek rekening gaji dan tunjangan ASN, membuat kuitansi pembayaran dan melakukan pembayaran	Sekretariat
		2) Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Adminstrasi Keuangan yang Disediakan	100 %	25%	25%	25%	25%	24%	24%				Rp 176.280.000	Mengecek administrasi keuangan ASN, membuat kuitansi pembayaran dan melakukan pembayaran	Sekretariat
		3) Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Ahir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				100%					Rp 6.294.000	Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, koordinasi ke bidang-bidang dan membuat laporan keuangan	Sekretariat
		4) Sub.Keg Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Di audit	1 Dokumen		1 Dokumen			100%					Rp 3.568.000	Mengumpulkan dan mengecek persiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Sekretariat
		3 Keg. Administrasi Barang Milik Daerah												Rp 16.336.000		
		1) Sub.Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				100%				Rp 4.140.000		Sekretariat
		2) Sub.Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%					Rp 3.696.000		Sekretariat
		3) Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	0%				Rp 8.500.000		Sekretariat
		4 Keg. Administrasi Pendapatan Daerah												Rp 3.672.000		
		1) Sub.Keg Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		100%				Rp 3.672.000	Mengecek Laporan Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	Sekretariat
		5 Keg. Administrasi Kepegawaian												Rp -	-	
		1) Sub.Keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		1 Paket								Rp -	-	Sekretariat
		6 Keg. Administrasi Umum Perangkat												Rp 336.334.117		
		1) Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					100%				Rp 5.172.557	Menyiapkan kebutuhan barang komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Melakukan Pemesanan Kepada Penyedia dan Membuat SPJ	Sekretariat
		2) Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang Disediakan, Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	41,35%	16,85%				Rp 82.349.360	Menyiapkan Dokumen Pesanan Kepada Penyedia, Membuat BAP, BAST dan membuat SPJ	Sekretariat

				3) Sub.Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Paket	1 Paket		1 Paket		16%	26,53%			Rp 26.112.200	Menyiapkan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan, Melakukan Pemesanan Kepada Penyedia dan SPJ	Sekretariat
				4) Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		14%	21,67%			Rp 2.700.000	Membuat Surat Pesanan Kepada Pihak Ketiga, Membayar Tagihan Kepada Pihak Ketiga dan membuat SPJ	Sekretariat
				5) Sub.Keg Penyelegaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Cakupan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	150	Laporan	23 Laporan	45	55 Laporan	27 Laporan	4,39%	36,18%			Rp 220.000.000	Membuat Surat Tugas SPD lalu mengecek berkas SPPD, membuat kuittansi pembayaran, dan melakukan pembayaran	Sekretariat
			7 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah													Rp 18.000.000		
			1) Sub.Keg Pengadaan Mebel			1 Paket						0%	89%			Rp 18.000.000		Sekretariat
			8 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang													Rp 1.244.742.332		
			1) Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air yang disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17,78%	13,34%			Rp 407.336.804	Mengecek Rekening Telepon, Listrik, Internet,Membuat Kwitansi Pembayaran dan melakukan Pembayaran	Sekretariat	
			2) Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor, perbaikan peralatan kerja, makanan dan minuman yang	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25,09%	17,11%			Rp 837.405.528	Menyiapkan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Melakukan Pemesanan Kepada Penyedia dan SPJ	Sekretariat	
			9 Keg. Pemeliharaan Barang Milik													Rp 372.976.422		
			1) Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Kendaraan		1 Kendaraan				26%	58,31%			Rp 19.400.000	Menyiapkan STNK, membayar Pajak Kendaraan roda 4 (empat), membuat SPJ,membuat kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran	Sekretariat	
			2) Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Kendaraan	8 Kendaraan	10 Kendaraan	7 Kendaraan	10 Kendaraan	10 Kendaraan	18,64%	32,72%			Rp 298.366.422	Menyiapkan STNK, membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), membuat SPJ,membuat kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran	Sekretariat	
			3) Sub.Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Peralatan	8 Peralatan	23 Peralatan	30 Peralatan	17 Peralatan	0%	0%			Rp 29.370.000	Melakukan cek terhadap gedung kantor, membuat surat pesanan kepada penyedia untuk melakukan pemeliharaan gedung kantor, membuat SPJ	Sekretariat		
			4) Sub.Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung		1 Gedung				0%	0%			Rp 25.840.000	Melakukan cek terhadap gedung kantor, membuat surat pesanan kepada penyedia untuk melakukan pemeliharaan gedung kantor, membuat SPJ	Sekretariat	
Meningkanya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Meningkatnya Angka Kecelakaan lalu Lintas	2. Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %											Rp 8.079.033.535			
Meningkanya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	1. Keg. Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota													Rp 10.584.000			
		1) Sub.Keg Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rencana Induk/Master Plan/Kajian)	1 Dokumen		1 Dokumen					0%	0%			Rp 10.584.000	Mengecek dan mengevaluasi dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Bidang PST	
Meningkanya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Meningkatnya Angka Kecelakaan lalu Lintas	2. Keg. Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													Rp 6.995.224.261			
		1) Sub.Keg Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan/Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum, Lampu Has dan	125 Prasarana							12,21%	12,52%			Rp 6.370.507.155	Mengecek dan melakukan survey terhadap pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Bidang PST	
		2) Sub.Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota yang Dipelihara	30 Prasarana							36,00%	33,38%			Rp 569.754.970	Melakukan rehabilitasi, melakukan survey/identifikasi gangguan PJU, koordinasi dan disposisi penanganan gangguan, persiapan peralatan kerja dan bahan material, penanganan gangguan dan melakukan pengecekan ulang	Bidang PST	
		3) Sub.Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan	50 Perlengkapan Jalan							0%	0%			Rp 54.962.136		Bidang Lalu Lintas	
Meningkanya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	3. Keg. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													Rp 8.000.000			
		1) Sub.Keg Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	1 Orang		1 Orang									Rp -	Mengevaluasi Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal	Bidang Angkutan	
		2) Sub.Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terrehabilitasi dan terpelihara	1 Terminal			1 Terminal				100%				Rp 8.000.000		Bidang Angkutan	

	Meningkanya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Meningkatnya Angka Kecelakaan lalu Lintas	4. Keg. Penerbitan Izin Penyelegaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir									Rp 169.135.000			
			1) Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelegaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelegaran dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	11%	34,50%		Rp 169.135.000	Bidang Angkutan
	Meningkanya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Meningkatnya Angka Kecelakaan lalu Lintas	5. Keg. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										Rp 303.121.870		
			1) Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	11	Sarpras	2 Sarpras	3 Sarpras	3 Sarpras	3 Sarpras	6,53%	10,70%		Rp 132.547.150	UPT.PKB
			2) Sub.Keg Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	7	Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1 Orang		49%		Rp 16.680.000	Mengevaluasi Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mengikuti Diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			3) Sub.Keg Penyediaan Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.500	Dokumen			2.500 Dokumen			75%		Rp 53.339.200	Mengecek penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
			4) Sub.Keg Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan		0%		Rp 3.000.000	UPT.PKB
			5) Sub.Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	33	Sarpras	8 Sarpras	10 Sarpras	12 Sarpras	13 Sarpras		25%		Rp 90.055.520	Mengidentifikasi/mendata alat pengujian, membuat surat pesanan kepada penyedia untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dan membuat SPJ
			6) Sub.Keg Monitoring dan Evaluasi Penyelegaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelegaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50	Laporan	12 Laporan	18 Laporan	15 Laporan	15 Laporan		0%		Rp 7.500.000	UPT.PKB
	Meningkanya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Meningkatnya Angka Kecelakaan lalu Lintas	6 Keg. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										Rp 481.828.404		
			1) Sub.Keg Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		43%		Rp 214.125.800	Melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan, penertiban sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan
			2) Sub.Keg Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan		1 Laporan			0%	0%		Rp 7.130.600	Melakukan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan rekayasa yang telah dilakukan pada jalan kabupaten/kota
			3) Sub.Keg Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		20%		Rp 20.764.000	Bidang Lalu Lintas
			4) Sub.Keg Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	Perlengkapan		1 Perlengkapan		1 Perlengkapan		1%		Rp 199.808.004	Mendata terlebih dahulu pada ruas jalan mana yang memerlukan pemasangan/perbaikan perlengkapan jalan, kemudian melakukan pemasangan serta perbaikan perlengkapan jalan sesuai data yang telah didapat
			5) Sub.Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan		1 Laporan			0%			Rp 40.000.000	Bidang Lalu Lintas
	Meningkanya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Meningkatnya Angka Kecelakaan lalu Lintas	7 Keg. Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan										Rp 40.252.000		
			1) Sub.Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penantuan Pemenuhan Persyaratan Penyelegaran Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Penantuan Pemenuhan Persyaratan Penyelegaran Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan		0%		Rp 8.252.000	Bidang Lalu Lintas
			2) Sub.Keg Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	Auditor				1 Auditor		79%		Rp 32.000.000	Bidang Lalu Lintas

	Meningkanya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	8 Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									Rp 70.888.000		
			1) Sub.Keg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan			13,92%	19,98%		Rp 70.888.000	Melaksanakan Pengawasan Angkutan (Posko terpadu angkutan lebaran, natal, tahun baru)	Bidang Angkutan
	Meningkanya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	3 Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran								Rp 4.357.000		
			1. Keg. Penetapan Lintas Penyeberangan									Rp 2.683.000		
			1) Sub.Keg Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	12	Laporan			0%	0%		Rp 2.683.000	1. Pengawasan Terhadap Ketersediaan Alat-Alat Keselamatan Kapal 2. Pemeriksaan Alat Kelengkapan Keselamatan yang Ada Pada Kapal	Bidang Angkutan
	Meningkanya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	1. Keg.Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian PelabuhanPengumpulan Lokal									Rp 1.674.000		
			1) Sub.Keg Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	7	Laporan			0%	0%		Rp 1.674.000		Bidang Angkutan
JUMLAH ANGGARAN														
Rp 16.824.797.007														

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta pemantauan pelaksanaan rencana aksi Dinas Perhubungan Kota Singkawang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Hingga Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran berdasarkan fisik dan keuangan per triwulan mencapai Rp 6.145.849.391 dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp 16.824.797.007. Dengan demikian, persentase capaian realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 36,53%. Meskipun persentase capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan dengan Triwulan I, angka ini masih dapat dikategorikan sedang. Hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan yang telah direncanakan masih mengalami penyesuaian anggaran dan efisiensi anggaran. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan agar seluruh kegiatan dapat terealisasi dengan baik pada Triwulan III dan IV tahun ini, guna mencapai target anggaran secara keseluruhan.
2. Hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja program dan kegiatan menunjukkan angka 53,72%, yang secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai capaian yang baik. Namun, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana dan masih dalam proses pelaksanaan, yang akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan penyesuaian anggaran kas yang telah direncanakan. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan progres yang positif, dan dengan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan, diharapkan kegiatan yang tertunda dapat diselesaikan pada triwulan berikutnya.
3. Persentase Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar 57%. Meskipun persentase ini menunjukkan progres yang positif, tetapi masih terdapat beberapa sub kegiatan pada program ini memiliki persentase 0% dan akan di kerjakan pada triwulan berikutnya.
4. Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar 72%. Meskipun persentase ini menunjukkan progres yang positif, tetapi masih terdapat beberapa sub kegiatan pada program ini memiliki persentase 0% dan akan di kerjakan pada triwulan berikutnya.
5. Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0%. Persentase pada Program Pelayaran menunjukkan bahwa belum ada kegiatan yang terealisasi pada triwulan II, selanjutnya akan di kerjakan pada triwulan berikutnya.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian IKU serta pemantauan pelaksanaan rencana aksi Dinas Perhubungan Kota Singkawang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Realisasi Anggaran
 - a. Memastikan seluruh sub kegiatan yang tertunda dapat terealisasi sesuai perencanaan Triwulan III dan IV.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui koordinasi lebih intensif antara Sekretariat dan bidang-bidang terkait.
 - c. Memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi.
2. Percepatan Pelaksanaan Sub Kegiatan yang Belum Terealisasi
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang belum terlaksana agar dapat dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
 - b. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, dan bahan pendukung untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melakukan monitoring rutin terhadap progres pelaksanaan sub kegiatan agar tidak tertunda kembali.
3. Peningkatan Efektivitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Menindaklanjuti sub kegiatan yang masih 0% dengan penjadwalan ulang dan alokasi sumber daya yang memadai.
 - b. Mengidentifikasi kendala teknis atau administratif yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak terlaksana, kemudian mencari solusi yang tepat.
4. Percepatan Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Memastikan sub kegiatan yang memiliki progres 0% segera diimplementasikan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas, keselamatan jalan, dan perlengkapan jalan.
 - b. Mengadakan rapat koordinasi internal untuk memastikan sinkronisasi antar seksi dan bidang agar pelaksanaan lebih cepat dan tepat sasaran.
5. Penyiapan dan Pelaksanaan Program Pelayaran
 - a. Menyusun rencana aksi konkret untuk Program Pelayaran, termasuk alokasi anggaran, SDM, dan sarana/prasarana yang diperlukan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal triwulan berikutnya agar capaian program dapat tercapai tepat waktu.

6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian fisik dan keuangan setiap program/sub kegiatan.
 - b. Menyusun laporan monev sebagai bahan pengambilan keputusan agar program dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
7. Peningkatan Kapasitas SDM
 - a. Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop kepada SDM yang terlibat di bidang perhubungan, pengelolaan jalan, terminal, dan pelayaran.
 - b. Menyusun SOP dan panduan kerja yang jelas untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

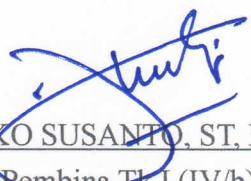
PENUTUP

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing program dan sub kegiatan. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan menunjukkan progres yang baik dengan rata-rata capaian fisik sebesar 53,72% dan realisasi anggaran sebesar 36,53%. Meskipun beberapa sub kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, capaian ini menggambarkan upaya yang positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, khususnya dalam meningkatkan keselamatan transportasi, pelayanan angkutan umum, serta pemeliharaan sarana prasarana transportasi perkotaan.

Capaian evaluasi rencana aksi yang telah dituangkan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025 diharapkan menjadi referensi yang representatif dan kredibel, yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan. Selain itu, laporan ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya, sehingga perbaikan kinerja dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Singkawang, Juli 2025



EKO SUSANTO, ST, MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760122 2003 1 007